

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutendi, 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah (kajian politik dan hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein, 2000, *Perpajakan*, Akademi Perusahaan YKPN, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Donard Games, 2011, *Menuju Kebangkitan Kewirausahaan di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang.
- Herman Malano, 2011, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Imam Soebachid, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002*, Andi Offset, Yogyakarta
- Marihot Pahala Siahaan, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada Univeristy Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Tjandra W Riawan, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

C. Internet

<http://redaksisumbar.com/pemko-bukittinggi-targetkan-pad-tahun-2017-rp-91-miliar/> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 Pukul 10.00 WIB

<http://www.minang-terkini.com/2015/09/target-pad-bukittinggi-tahun-2016.html> diakses pada tanggal 22 Januari 2017 Pukul 11.00